

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Semakin berkembangnya globalisasi perekonomian dunia bisnis saat ini telah menimbulkan persaingan ekonomi yang ketat. Persaingan ini memicu para pelaku bisnis dan ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan agar bisnisnya tetap dapat bertahan di dunia bisnis. Tentu saja tidak cukup dengan bertahan di dunia bisnis saja, perusahaan juga harus dapat bergerak agar dapat mengungguli para pesaing-pesaingnya dalam pasar, karena semakin maraknya pesaing maka semakin besar ancaman perusahaan. Seiring dengan semakin meningkatnya operasi dalam perusahaan, manajemen puncak tidak memiliki komunikasi yang cukup dengan berbagai operasi yang ada untuk menilai keefektifan kinerja sehingga menjadi titik kelemahan dalam perusahaan. Keterbatasan komunikasi antara manajemen puncak dan lini operasi yang sedang berjalan tersebut tidak dapat menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya praktik-praktik yang dapat membahayakan perusahaan seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut akan sulit untuk dideteksi, karena akan diketahui apabila adanya kebetulan atau suatu hal yang disengaja. Praktik ini juga merupakan ancaman yang berbahaya bagi perusahaan, karena tindakan tersebut memiliki efek terhadap risiko kerugian keuangan yang berakibat perusahaan itu dapat

mengalami kebangkrutan. Faktor yang dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat membahayakan perusahaan, yaitu penerapan *good corporate governance* pada perusahaan. Istilah *good corporate governance* tersebut muncul terutama sejak adanya skandal internasional, seperti dalam kasus *Enron* dan *WorldCom*, dengan demikian *good corporate governance* tersebut bukan merupakan pola baru atau merupakan sebuah inovasi, tetapi merupakan suatu pertanggungjawaban kepada publik mengenai perkembangan yang ada. *Good corporate governance* ini juga berupaya untuk menghasilkan tatakelola organisasi atau pemerintahan yang baik, apabila ditinjau dari konsep *good corporate governance* tersebut maka *good corporate governance* mencakup tidak hanya diterapkan pada sektor pemerintah saja tetapi juga pada sektor swasta, tetapi *good corporate governance* tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada setiap organisasi atau perusahaan hal ini dimaksudkan karena kebutuhan setiap perusahaan berbeda-beda. *Good corporate governance* memiliki dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapannya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal terdiri dari *corporate culture* yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di perusahaan, manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah *good corporate governance*, terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin terjadi, dan yang terakhir adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan

mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. Sementara didalam faktor eksternal yaitu, pelaku dan lingkungan bisnis, pemerintah dan regulator, investor, dan komunitas keuangan.

Dari beberapa faktor diatas standar profesional audit internal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam Terwujudnya *good corporate governance*. Dimana standar profesional audit internal sebagai orang dalam bagian perusahaan yang mengetahui bagaimana kinerja sehari-hari di perusahaan, harus dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam mewujudkan *good corporate governance* auditor internal harus dapat memastikan bahwa manajemen telah mengembangkan nilai-nilai etika di dalam organisasi yang mencukupi, efektifitas dan akuntabilitas di dalam pengelolaan kinerja organisasi telah tercapai, adanya komunikasi yang baik mengenai risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi serta terlaksananya koordinasi kegiatan dan aliran komunikasi yang efektif.

Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lain bukan hanya akibat faktor ekonomi makro, namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada pada negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (audit) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas. Di Indonesia terdapat perusahaan BUMN dan BUMD, secara umum perusahaan daerah merupakan orientasi bisnis yang berorientasi untuk pasar lokal. Hal ini berkaitan dengan filosofi bahwa perusahaan daerah merupakan entitas bisnis

yang berada pada kendali pemerintah daerah dan menunjang kegiatan pemerintah di daerah.

PT Kereta Api Indonesia (persero) (disingkat PT KAI) Kota Bandung mengalami suatu masalah yang bermuara dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit. Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Perbedaan pandangan tersebut bersumber pada perbedaan pendapat mengenai:

1. Masalah piutang PPN

Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp 95,2 M, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor. Manajemen menganggap bahwa pemberian jasa yang dilakukannya tidak kena PPN, namun karena Dirjen Pajak menagih PPN atas jasa tersebut, PT KAI menagih PPN tersebut kepada pelanggan.

2. Masalah Beban Ditangguhkan yang Berasal dari Penurunan Nilai Persediaan

Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp 6 M yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum di amortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.

3. Masalah Persediaan Dalam Perjalanan

Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang RP 1,4 M yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

4. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS)
Dan Penyertaan Modal Negara (PMN)

BPYBDS sebesar Rp 674,5 M dan PMN sebesar Rp 70 M yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

5. Masalah Uang Muka Gaji

Biaya dibayar di muka sebesar Rp 28 Milyar yang merupakan gaji bulan Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005

Beberapa hal yang diidentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT Kereta Api, adalah :

1. Auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor eksternal.
2. Komite audit tidak ikut dalam proses penunjukkan auditor sehingga tidak terlibat dalam proses audit.

3. Manajemen (termasuk auditor internal) tidak melaporkan pada komite audit, dan komite audit juga tidak menanyakannya.
4. Adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, sehingga ketika komite audit mempertanyakannya, manajemen merasa tidak yakin. (yvesrey, 2011).

Selain kasus diatas terdapat pula kasus terungkapnya skandal Waskita Karya, salah satu BUMN Jasa Konstruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan patu dicermati secara mendalam. Ditengah gembar-gembor pelaksanaan implementasi Good Corporate Governance BUMN, terbongkarnya kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun lalu, menemukan pencatatan yang tidak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp 400 Miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multi tahun kedepan sebagai pendapatan tahun tertentu. Kasus ini memberikan tamparan keras untuk kementerian Negara BUMN. Implementasi GCG di Indonesia ternyata masih sekedar formalitas belaka. Fakta ini terungkap dari keengganan Direksi Waskita melaksanakan GCG di Waskita. Hal ini menunjukkan betapa canggih dan cermatnya penutupan jejak dari kasus ini. (Mekka, 2011).

Dari kedua fenomena tersebut dapat dilihat bahwa kedua perusahaan tersebut melanggar prinsip-prinsip GCG yaitu fairness, dimana terdapat beberapa pihak yang telah merugikan public dengan mementingkan kepentingan dan keuntungan perusahaan dengan melakukan rekayasa laporan keuangan. Buruknya implementasi

GCG yang terjadi yaitu dikarenakan pihak-pihak yang melakukan internal control mulai dari Dewan Komisaris, Internal Audit serta komite audit tidak melakukan fungsinya dengan optimal. Hal ini patut disayangkan mengingat GCG merupakan alat control yang menciptakan check and balances yang digunakan dalam pengawasan pengelolaan perusahaan.

Dari kasus tersebut maka diperlukannya suatu pengelolaan dan pengawasan yang baik dilakukan oleh perusahaan, untuk itu maka diperlukannya penerapan *good corporate governance* agar dapat mengurangi suatu kesalahan yang mengakibatkan suatu kerugian pada perusahaan atau organisasi. Karena itu *good corporate governance* memiliki prinsip-prinsip yang dapat mencegah penyimpangan perusahaan, yaitu keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Menurut Gusti Amri selaku pakar *good corporate governance* di Indonesia pada situsnya menjelaskan bahwa “Penerapan praktek-praktek *good corporate governance* merupakan salah satu langkah penting bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*), mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, serta stakeholders lainnya. Kesadaran akan pentingnya *good corporate governance* bagi BUMD adalah karena keinginan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat.

Beberapa hal yang perlu dilakukan BUMD dalam rangka program pengembangan dan penerapan praktek-praktek *good corporate governance*:

1. Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan praktek-praktek *good corporate governance*;
2. Mengembangkan model pengelolaan perusahaan yang mampu mendukung tumbuhnya profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dan tanggungjawab;
3. Mengembangkan sikap dalam melihat implementasi *good corporate governance* sebagai kebutuhan dan tuntutan etik, bukan semata sebagai kepatuhan terhadap regulasi.”

Oleh karena itu, diharapkan mulai dari sekarang semua perusahaan melakukan upaya untuk mulai mewujudkan *good corporate governance* guna mencapai sasaran dan tujuan yang hendak ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam upaya penerapan *good corporate governance* peran standar profesional audit internal yang independen sangatlah penting dan standar profesional audit internal merupakan kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Standar profesional audit internal dapat membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, serta tata kelola. Dengan penerapan *good corporate*

governance akan tercapai peningkatan kinerja pelayanan dan manajemen pada PT. KAI (persero), seperti yang diharapkan.

Untuk itu perusahaan daerah sudah sewajarnya agar menerapkan *good corporate governance* agar perusahaan dapat mencapai tujuannya yaitu turut serta dalam mensejahterakan masyarakat melalui fungsi-fungsi sosial seperti pelayanan, pemberdayaan, pengembangan usaha bagi masyarakat agar lebih berkembang dan memperoleh keuntungan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pelaksanaan Standar profesional audit internal terhadap Terwujudnya *Good Corporate Governance*”** (Studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Standar Profesional Audit Internal pada PT. Kereta Api Indonesia (persero)
2. Bagaimana terwujudnya *good corporate governance* pada PT. Kereta Api Indonesia (persero)
3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan standar profesional audit internal terhadap terwujudnya *good corporate governance* pada PT. Kereta Api Indonesia (persero).

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan pengaruh audit internal terhadap *good corporate governance*.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan standar profesional audit internal pada PT. Kereta Api Indonesia (persero)
2. Terwujudnya *Good corporate governance* pada perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (persero)
3. Pengaruh pelaksanaan standar profesional audit internal terhadap terwujudnya *good corporate governance* pada PT. Kereta Api Indonesia (persero) di kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh

pelaksanaan standar profesional audit internal terhadap terwujudnya *Good Corporate Governance*.

2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literature-literature lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada di perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah audit secara umum.
- b. Hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Pengaruh Pelaksanaan Standar Profesional Audit Internal terhadap Terwujudnya *Good Corporate Governance*.

3. Bagi Instansi yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh Pelaksanaan Standar Profesional Audit Internal terhadap Terwujudnya *Good Corporate Governance* yang dihasilkan oleh pelaksanaan audit pada instansi yang diteliti.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai Pengaruh Pelaksanaan Standar Profesional Audit Internal terhadap Terwujudnya *Good Corporate Governance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Kota Bandung 40117. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan April 2017 sampai selesai.